

# PEMBANGUNAN KEKUATAN TNI AL DALAM RANGKA MENDUKUNG VISI INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA

## THE INDONESIAN NAVY FORCE PLANNING TO SUPPORT INDONESIAN VISION AS WORLD'S MARITIME FULCRUM

Ade Supandi<sup>1</sup>

Kepala Staf Angkatan Laut  
(2337pandi@gmail.com)

**Abstrak** - Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan pembangunan sektor maritim yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia juga berupaya untuk mengoptimalkan posisi geografis Indonesia sebagai jalur perdagangan laut dunia (*Sea Lines of Trade/SLOT*) untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros pelayaran dan perdagangan dunia. Konsekuensinya adalah bahwa Indonesia harus menyediakan infrastruktur dan layanan, serta keamanan dan keselamatan maritim sesuai dengan standar internasional di wilayah Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut akan menuntut kemampuan TNI AL dalam memantau, mengontrol, melindungi keamanan maritim, dan kemampuan penegakan hukum untuk mewujudkan ketertiban di laut, serta perlindungan terhadap kedaulatan, aset, dan kepentingan maritim Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, TNI AL secara berkesinambungan mengembangkan kekuatan untuk mendukung pembangunan kelautan Indonesia.

**Kata Kunci:** kejayaan maritim, keamanan maritim, pembangunan kekuatan TNI AL

**Abstract** - Since the beginning of President Joko Widodo's administration has committed to restore the Indonesian maritime glory. The Indonesian government has increased the development of the maritime sector, which is expected to boost economic growth and welfare of the Indonesian people. The Indonesian government also seeks to optimize Indonesia's geographic position along the world's sea lanes of trades (SLOTs) to turn Indonesia into the world's shipping and trade hub. The consequence is that Indonesia must provide the infrastructure and services in accordance with international standards, as well as maritime security and safety in Indonesia's territory. At the end, it will challenge the Indonesian Navy's ability to control, monitor, protect maritime security, and its ability to enforce the rule of law to create law and order at the sea, as well as protection on Indonesian sovereignty, asset, and maritime interests. To achieve these goals, Indonesian Navy is continuously developing its force to support Indonesian maritime development.

**Keywords:** maritime glory, maritime security, Indonesian navy's force planning

---

<sup>1</sup> Laksamana TNI Ade Supandi, saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut.

## Pendahuluan

Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikan perairan Indonesia salah satu yang terpenting di dunia. Peran strategis Perairan Indonesia sebagai jalur pelayaran dunia kedepan akan semakin penting sejalan dengan meningkatnya permintaan energi dan sumber daya alam (SDA) lainnya, yang diperkirakan pada tahun 2040 akan meningkat 56%.<sup>2</sup> Perairan Indonesia utamanya Selat Malaka, serta Selat Hormuz, Terusan Suez dan Terusan Panama dianggap sebagai jalur penting dan kritis bagi perdagangan dunia.<sup>3</sup> Secara umum kawasan regional Asia Tenggara dipandang penting bagi negara-negara di dunia sebagai jalur komunikasi laut (*Sea lines of Communication/SLOC*) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lines of Trade/SLOT*) yang vital bagi perdagangan internasional.<sup>4</sup>

Bagi bangsa Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang diakui dunia melalui *The United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (UNCLOS 1982), laut merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat dibedakan menurut rezim hukum yang mengaturnya. Laut yang luasnya 2/3 dari seluruh bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah seharusnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia, meskipun negara lain juga masih memiliki hak pemanfaatan sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982.<sup>5</sup> Kesadaran terhadap konstelasi geografis Indonesia ini telah membawa kesadaran pada pemerintah Indonesia saat ini untuk menekankan kebijakan pembangunan Indonesia periode 2015-2019 dengan visi mewujudkan Indonesia sebagai

---

<sup>2</sup> Strategi Maritim Amerika Serikat, "A Cooperative Strategy for 21<sup>st</sup> Century Seapower", 2015, hlm. 6, dalam <http://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf>, diunduh pada 25 Juni 2015.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Geoffrey Till memperkirakan bahwa di masa mendatang masalah perbatasan dan perdagangan serta transportasi internasional melalui SLOC/ SLOT di kawasan perairan Asia Tenggara akan semakin meningkat, dalam Geoffrey Till, *Seapower - A Guide for the Twenty-First Century' -Second Edition*, (London: Frank Cass Publishers, 2009), hlm. 345-349.

<sup>5</sup> Indonesia telah mengakomodasikan empat jenis lintas bagi kapal dan pesawat udara asing. Pengakuan akan hak lintas ini sesuai dengan konvensi hukum laut dan dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995. Pelaksanaan hak lintas damai telah diakomodasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 dan hak lintas alur laut kepulauan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002. Indonesia memberikan akses kepada kapal dan pesawat udara Malaysia untuk melaksanakan hak lintas akses dan komunikasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Bilateral yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1983.

Poros Maritim Dunia (PMD), sebagai bentuk implementasi geostrategi dan geoekonomi Indonesia untuk bertransformasi menjadi sebuah negara maritim.<sup>6</sup>

Visi pemerintahan saat ini merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang harus ditindaklanjuti dengan langkah cermat dan tepat oleh TNI secara umum, serta TNI Angkatan Laut (TNI AL) secara khusus, untuk mendukung program pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai PMD. Sesuai dengan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, maka aspek pertahanan dan keamanan maritim menjadi hal penting yang harus dibenahi karena keamanan di wilayah laut Indonesia menjadi faktor penentu kesuksesan program pemerintah tersebut.

Secara praktis, pencapaian visi PMD harus berbanding lurus dengan kondisi stabilitas nasional. Dengan kata lain, pembangunan maritim yang berhasil hanya dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh pertahanan dan keamanan yang tangguh, baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Dengan demikian, TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut yang mengemban fungsi penangkal, penindak dan pemulih keamanan nasional wajib menjalankan tugasnya untuk menegakkan kedaulatan bangsa di laut, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta menjaga keselamatan segenap bangsa. Agar tugas-tugas tersebut dapat terlaksana secara optimal, maka kolaborasi konsep pembangunan kekuatan TNI AL dengan konsep pembangunan maritim harus sejalan, integratif, saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya.

---

<sup>6</sup> Pernyataan ini diekstraksi dari pidato kenegaraan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, sesuai pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih periode 2014-2019, pada tanggal 20 Oktober 2014. Terdapat tiga paragraf yang perlu digarisbawahi terkait dengan visi pembangunan Indonesia yang berbasis kemaritiman. Presiden menekankan antara lain: *Pertama*, Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. *Kedua*, Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana. *Ketiga*, Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudra dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.

## Visi Poros Maritim Dunia

Sejak awal saat pelantikannya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk tidak lagi memunggungi laut Indonesia, serta ingin mengembalikan kejayaan kelautan Indonesia seperti pada masa lalu. Pemerintah telah meningkatkan pembangunan di sektor maritim, diantaranya dengan melaksanakan sistem logistik kelautan atau dengan nama lain Pendulum Nusantara atau pembangunan konsep Tol Laut.<sup>7</sup> Konsep ini bertumpu pada penggunaan kapal-kapal bertonase besar untuk melayani lalulintas logistik dari Wilayah Barat ke Wilayah Timur Indonesia atau sebaliknya. Pemerintah juga mengembangkan sarana dan infrastruktur pelabuhan, serta mendorong keberadaan pelabuhan yang dapat disinggahi kapal-kapal besar sehingga pelaksanaan distribusi logistik dan perekonomian nasional semakin efisien dan merata.<sup>8</sup>

Misi untuk mengembalikan kejayaan bangsa menjadi negara maritim tertuang dalam bentuk visi, misi dan strategi pemerintah, yang merupakan rangkaian misi untuk mencapai visi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yang isinya antara lain:<sup>9</sup>

- a. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- b. mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
- c. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- d. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- e. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- f. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional; dan

---

<sup>7</sup> Ariesta Diana, "Bangkitkan Industri Maritim dengan Tol Laut", dalam Indroyono Soesilo, *Iptek Pertahanan Penopang Indonesia PMD*, (Bogor: Sains Press, 2015), hlm. 16-18.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Kemensesneg RI, *Visi, Misi dan Strategi*, dalam <http://www.indonesia.go.id/in/sekilas-indonesia/visi-misi-dan-strategi>, diunduh pada 25 Juni 2015.

- g. mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Keinginan kuat pemerintah untuk mengembalikan kehidupan maritim Indonesia ini juga tercermin dari ditetapkannya agenda pembangunan yang bercorak maritim yang disebut sebagai Lima Pilar Utama guna mewujudkan Indonesia sebagai PMD. Hal ini disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia secara langsung pada acara pertemuan puncak negara-negara Asia Timur ke-9, *9th East Asia Summit (EAS)* di Myanmar, pada tanggal 13 November 2014, yang isinya yaitu:<sup>10</sup>

*Pertama*, sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau lebih, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra.

*Kedua*, komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim akan digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.

*Ketiga*, komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun Tol Laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim.

*Keempat*, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

*Kelima*, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

---

<sup>10</sup> Srenal, Salinan naskah terjemahan pidato Presiden Republik Indonesia pada *9th East Asia Summit*, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menegaskan komitmen Indonesia yang secara langsung turut berkepentingan untuk berperan menentukan masa depan kawasan Pasifik dan Samudra Hindia (*the Pacific and Indian Ocean Region*, PACINDO), sehingga Indonesia ingin Samudra Hindia dan Samudra Pasifik tetap damai dan aman bagi perdagangan dunia, bukan dijadikan ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan persaingan supremasi maritim. Visi PMD pada dasarnya adalah bentuk dari kesadaran akan posisi strategis Indonesia yang merupakan bagian jalur perdagangan dunia (SLOT) yang secara umum perairan Indonesia sudah sejak lama dijadikan jalur komunikasi dan perhubungan dunia (SLOC). Dalam jalur perdagangan dunia tersebut, Indonesia juga mendapatkan perhatian serius dari negara-negara pengguna laut karena memiliki setidaknya tiga *choke point* yang terletak di tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok.

Sejalan dengan pemerintah, makna dari PMD juga dijelaskan oleh Laksamana (Purn) Bernard Kent Shondakh, bahwa berdasarkan posisi, luas, dan bentuk geografisnya, Indonesia sewajarnya merupakan *focal area*, yaitu merupakan tempat berkumpulnya pelayaran dalam beberapa jalur. Hanya potensi geografis ini belum dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan ekonomi dan politik. Menurut Laksamana (Purn) Kent, hal ini disebabkan oleh pembangunan infrastruktur pelabuhan dan pelayanan pelayaran serta keamanan di pelabuhan Indonesia belum memadai. Karena kondisi tersebut, praktis kapal-kapal internasional hanya melintas di perairan Indonesia tanpa singgah dan Indonesia tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dari pelayaran tersebut.<sup>11</sup>

Mengacu pada pemikiran Alfred Thayer Mahan dalam perspektif keangkatan lautan, menjelaskan *maritime power* dari suatu bangsa untuk mencapai visi maritimnya dapat terwujud dengan terpenuhinya syarat-syarat dasar yaitu: posisi geografi, bentuk fisik, dan luas wilayah; jumlah populasi dan karakter bangsa; dan karakter pemerintah.<sup>12</sup> Meskipun berbeda perspektif, visi pemerintah untuk membangun Indonesia sebagai PMD yang bersifat keekonomian dan politik jelas sekali sangat relevan dan selaras dengan pemikiran Mahan tersebut. Pemerintah saat ini sedang berupaya mengembalikan

---

<sup>11</sup> Bernard Kent Shondakh, "Mantan Kasal: Kurang Paham Konsep Poros Maritim Pemerintah", *Jurnal Maritim*, dalam <http://jurnalmaritim.com/2015/03/mantan-kasal-kurang-paham-konsep-poros-maritim-pemerintah/>, 20 Maret 2015, diunduh pada 16 Mei 2015.

<sup>12</sup> Alfred Thayer Mahan, *The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783*, (US: Little, Brown and Co, 1890).

karakter pemerintahan dan rakyat agar bercorak maritim dengan menggiatkan program-program pembangunan ekonomi dan politik yang berwawasan maritim, yang dilandasi modal dasar konstelasi geografis dan jumlah populasi rakyat Indonesia yang besar jumlahnya.

### **Peluang dan Tantangan serta Konsekuensi Posisi Strategis Indonesia**

Secara geografis Indonesia terdiri dari ribuan pulau, berada di garis khatulistiwa, dan di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Wilayah lautnya terdiri dari laut teritorial, perairan kepulauan dan perairan pedalaman seluas lebih kurang 2,7 juta kilometer persegi atau sekitar 70% dari luas wilayah NKRI, ditambah dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 3,1 kilometer persegi, sehingga luas keseluruhan luas wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia menjadi 5,8 juta kilometer persegi.<sup>13</sup> Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia sudah sepatutnya seluruh aspek kehidupan dan penyelenggaraan negara senantiasa mempertimbangkan geostrategi, geopolitik, geoekonomi dan sosial budaya sebagai negara maritim. Pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa harus didasari oleh kesadaran ruang maritim tempat kita berada, sehingga visi maritim menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia.

Konstelasi geografis tersebut secara alamiah akan mengarah pada terwujudnya aktivitas pelayaran di wilayah Indonesia. Pentingnya pelayaran bagi Indonesia tentunya disebabkan oleh posisi, luas, dan bentuk geografisnya. Posisi Indonesia yang strategis berada dalam jalur persilangan dunia, membuat Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengembangkan perekonomian.<sup>14</sup> Perairan Indonesia yang merupakan bagian dari SLOC pelayaran internasional, menjadi sangat penting bagi masyarakat dunia pengguna laut.<sup>15</sup> Hal tersebut memberi arti bahwa manakala bangsa Indonesia mampu memanfaatkan peluang dan tantangan yang ada di wilayah lautnya, maka akan dapat memanfaatkan potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>13</sup> Srenal, 2015, Makalah Kepala Staf TNI AL: Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD.

<sup>14</sup> "PMD dan Peran Indonesia di Internasional", *Jurnal Maritim*, dalam <http://jurnalmaritim.com/2014/12/poros-maritim-dunia-dan-peran-indonesia-di-internasional>, 26 Desember 2014, diunduh pada 19 Mei 2015.

<sup>15</sup> Geoffrey Till, *op.cit.*, 345-349.

masyarakat. Sebaliknya manakala bangsa Indonesia tidak mampu mengantisipasi dan mengelola kendala dan kerawanan yang timbul, maka akan berdampak terhadap keamanan bahkan kedaulatannya. Dengan kata lain, nilai strategis itu juga dapat dijadikan peluang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan kepentingan pribadi atau kelompok.<sup>16</sup>

Frekuensi kapal asing yang melintasi wilayah laut Indonesia utamanya Selat Malaka saat ini semakin meningkat seiring dengan bergesernya pusat kegiatan ekonomi dunia ke wilayah Asia. Sekitar 70% angkutan barang dari Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik dan sebaliknya melalui perairan Indonesia. Namun sungguh ironis, meskipun posisi strategis tersebut telah dimanfaatkan oleh pengguna laut, realitanya tidak serta merta Indonesia dapat memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, karena keterbatasan kemampuan bangsa Indonesia dalam memanfaatkan peluang yang ada.<sup>17</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di posisi strategis dalam dinamika di kawasan Asia Pasifik dan mempunyai sejumlah *choke points* strategis saat ini terus berupaya meningkatkan volume perdagangan. Indonesia dengan negara-negara Asia Pasifik seiring penetapan pasar bebas Asia Pasifik, baik dalam kerangka *Asia Pacific Economy Cooperation (APEC)*,<sup>18</sup> *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*,<sup>19</sup> maupun kerangka bilateral seperti *Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement (JIEPA)*<sup>20</sup> serta kerangka regional dalam *ASEAN Economy Community (AEC)*.<sup>21</sup> Peluang ekonomi inilah yang akan dimaksimalkan oleh pemerintah saat ini melalui pembangunan sektor kemaritiman dengan landasan visi PMD.

---

<sup>16</sup> Kazumine Akimoto, "The Current State of Maritime Security-Structural Weaknesses and Threats in the Sea Lanes", makalah yang dipaparkan dalam acara *Maritime Security in Southeast Asia and Southwest Asia*, Tokyo, 2001, hlm.4-6.

<sup>17</sup> Rochmin Dahuri, "Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap", dalam <http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur.Lelap>, 3 Juni 2014, diunduh pada 25 Juni 2015.

<sup>18</sup> Lihat, [www.apec.org](http://www.apec.org), diunduh pada 26 Juni 2015.

<sup>19</sup> Lihat, <http://www.asean-cn.org/default.aspx>, diunduh pada 26 Juni 2015.

<sup>20</sup> Lihat, <http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>, diunduh pada 26 Juni 2015.

<sup>21</sup> Lihat, <http://www.asean.org/communities/asean-economic-community>, diunduh pada 26 Juni 2015.



Pemerintah telah menegaskan bahwa geopolitik Indonesia di bawah masa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo adalah maritim.<sup>22</sup> PMD merupakan sebuah tekad untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai negara maritim sehingga diperlukan pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, pemberdayaan seluruh potensi maritim demi kemakmuran bangsa, pemerataan ekonomi Indonesia melalui tol laut, dan melaksanakan diplomasi maritim dalam bingkai politik luar negeri Indonesia.<sup>23</sup>

Situasi tersebut selain memberikan peluang tentunya secara langsung juga memberikan tantangan terhadap situasi keamanan. Konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan harus mengakomodasi kepentingan internasional khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan dan laut teritorialnya. Pada akhirnya visi PMD juga memberikan tuntutan akan kapasitas TNI AL untuk mengontrol, mengawasi, dan melindungi keamanan maritim.<sup>24</sup> Keamanan maritim sendiri memiliki pengertian kegiatan sipil maupun militer untuk mengurangi risiko melawan kegiatan ilegal dan ancaman dalam ruang domain maritim, dengan cara penegakan hukum dan aturan demi melindungi warga negara dan kepentingan nasional.<sup>25</sup> Peningkatan kekuatan TNI AL berguna untuk menegaskan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia dan menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap perlindungan domain maritimnya, begitu juga perlindungan kedaulatan di perbatasan laut Indonesia.

### **Ancaman Keamanan Maritim di Indonesia dan Kawasan**

Potensi dari posisi strategis yang dimiliki Indonesia juga membawa konsekuensi munculnya sejumlah tantangan di bidang pertahanan dan keamanan maritim baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Konstelasi geografis Indonesia yang terbuka dan berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, sangat memungkinkan terjadinya kejahatan lintas negara dan konflik antar negara seperti:

---

<sup>22</sup> "PMD dan Peran Indonesia di Internasional", *Jurnal Maritim*, dalam <http://jurnalmaritim.com/2014/12/poros-maritim-dunia-dan-peran-indonesia-di-internasional>, 26 Desember 2014, diunduh pada 19 Mei 2015.

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982), Pasal 46.

<sup>25</sup> Srenal, 2015. Makalah Kepala Staf TNI AL: Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD.

penyelundupan manusia atau barang terlarang, imigran gelap, *illegal/unreported/unregulated* (IUU) *fishing*, perompakan/pembajakan, pencemaran lingkungan laut, terorisme maritim, serta sengketa batas laut.<sup>26</sup> Ancaman keamanan maritim yang dihadapi Indonesia pada akhirnya akan menjadi permasalahan bersama di kawasan Asia Tenggara atau sebaliknya, yang dapat berkembang menjadi masalah bagi pertahanan dan keamanan, baik di tingkat nasional, regional maupun global.

Penyebaran pengaruh keamanan kawasan ini dijelaskan oleh Philipp Annawitt dalam *Geneva Centre for Security Policy* 2010, bahwa keamanan di tingkat lokal dengan sangat mudah akan mempengaruhi dan berdampak pada tingkat nasional dan tingkat seterusnya sehingga pada akhirnya mempengaruhi keamanan regional dan global.<sup>27</sup> Stig Jarle Hansen memberikan contoh bentuk nyata dari karakter ancaman tersebut yaitu terkait dengan keberadaan pembajak di perairan Somalia.<sup>28</sup> Pada awalnya para pelaku pembajakan di Somalia hanyalah sekelompok nelayan yang melakukan pembajakan terhadap kapal-kapal yang melakukan *illegal fishing* di wilayah mereka. Namun karena faktor keamanan dalam negeri yang tidak kunjung stabil akibat dampak krisis politik di dalam negeri, mereka berubah motif menjadi kelompok-kelompok bersenjata yang melakukan pembajakan kepada setiap kapal kargo bernilai tinggi yang melintasi perairannya. Akhirnya permasalahan pembajakan di Somalia menjadi permasalahan global, sehingga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi Nomor 1851 tentang pemberantasan perompak di wilayah laut Somalia sebagai legalitas berbagai Angkatan Laut untuk melakukan operasi militer wilayah tersebut guna menjaga kepentingan masing-masing.

Di sisi lain, isu Laut Cina Selatan yang belum menemukan titik temu sampai saat ini juga memberikan pengaruh terhadap tatanan keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Hal ini disebabkan keterlibatan negara-negara di kawasan seperti Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan Malaysia dalam klaim teritorial tersebut. Pemutakhiran sistem

---

<sup>26</sup> "Isu Keamanan Maritim Regional", *Tabloid Diplomasi*, Edisi 4 Tahun I, September 2010, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/Suplemen%20September%202010.pdf>, diunduh pada 25 Juni 2015.

<sup>27</sup> Philipp Annawitt, "Global Security and Regional Responses: Conflict Management in a Fractured World", *Geneva Papers*, 2010, hlm. 11.

<sup>28</sup> Stig Jarle Hansen, "Debunking The Piracy Myth: How Illegal Fishing Really Interacts with Piracy In East Africa", *The Rusi Jurnal*, 2012.

persenjataan dan perkembangan perekonomian Tiongkok semakin merubah konstelasi politik dan keamanan hingga ke kawasan Asia Pasifik dimana salah satu simbol modernisasi militer Tiongkok adalah pengoperasian kapal induk Liaoning (eks Varyag) yang telah mengalami *refurbished* di galangan Dalian.<sup>29</sup>

Kebangkitan Tiongkok di bidang militer memunculkan kekhawatiran dari negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik, antara lain karena Tiongkok masih memiliki sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.<sup>30</sup> Kekhawatiran negara-negara tersebut dapat dipahami seiring makin asertifnya Tiongkok dalam menegaskan klaimnya. Sejumlah insiden di Laut Cina Selatan yang melibatkan kapal pemerintah Tiongkok dan kapal perang dan kapal lainnya milik Vietnam dan Filipina menegaskan kekhawatiran itu. Begitu juga dengan sejumlah insiden di Laut Cina Timur antara Tiongkok dan Jepang dalam sengketa atas Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang semakin memanas dalam beberapa waktu terakhir.<sup>31</sup> Kondisi ini memungkinkan munculnya campur tangan negara lain yang juga berkepentingan di kawasan.<sup>32</sup> Telah kita ketahui bersama bahwa kebijakan Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik yang diumumkan oleh Presiden Barack Obama pada 5 Januari 2012 yang lebih dikenal sebagai *rebalancing*, dibuat untuk menandingi atau meredam pengaruh Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. Kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen berjudul *Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense* yang memuat secara garis besar prioritas-prioritas pertahanan Amerika Serikat hingga akhir dekade ini yang berencana memproyeksikan 60% kekuatan Angkatan Laut di kawasan Asia-Pasifik.<sup>33</sup>

Benturan kepentingan negara-negara tersebut sewaktu-waktu dapat berubah menjadi konflik terbuka, apabila tidak ada mekanisme yang tepat untuk mengatasi krisis

---

<sup>29</sup> Jane's Defence Weekly Online, "China Commissions First Aircraft Carrier", dalam <http://www.janes-defence-weekly.com>, 25 September 2012, diunduh pada 27 Juni 2015.

<sup>30</sup> Ian Easton, "China's Military Strategy In The Asia-Pacific: Implications For Regional Stability", *Project 2049 Institute*, 2013, dalam [http://www.project2049.net/documents/China\\_Military\\_Strategy\\_Easton.pdf](http://www.project2049.net/documents/China_Military_Strategy_Easton.pdf), diunduh pada 26 Juni 2015.

<sup>31</sup> Jane's Defence Weekly Online, "Chinese Frigates Locked Onto Japanese JMSDF ship, Helicopter in Disputed Waters", <http://www.janes-defence-weekly.com>, 6 February 2013, diunduh pada 27 Juni 2015.

<sup>32</sup> Alan Collins, "Security and Southeast Asia: Domestic, Regional, and Global Issues", dalam Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 226.

<sup>33</sup> Ralf Emmers, "The US Rebalancing Strategy: Impact on the South China Sea", National Security College, Australian National University, dalam <http://nsc.anu.edu.au/documents/occasional-5-brief-8.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2015.

tersebut. Indonesia yang berada di dalam kawasan tersebut dapat dipastikan akan menerima dampaknya, baik dalam bentuk gangguan keamanan atau ancaman kedaulatan, meskipun Indonesia bukanlah salah satu *claimant states*.

### **Kebijakan Pertahanan Negara**

Secara umum, kebijakan pertahanan negara diimplementasikan melalui segala kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, untuk mengoptimalkan kemampuan dalam menanggulangi berbagai ancaman. Kebijakan pertahanan negara mencakup pembangunan, pengerahan, maupun pemberdayaan pertahanan negara yang didukung kebijakan penganggaran dan pengawasan. Pelaksanaannya secara terpadu dan terarah bagi segenap komponen pertahanan negara, baik Pertahanan Militer maupun Pertahanan Nirmiliter.<sup>34</sup> Fungsi dan peranan militer memiliki dua dimensi yakni fungsi dan peranan untuk melakukan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang, sedangkan Pertahanan Nirmiliter memiliki dua fungsi. Pertama, fungsi pertahanan sebagai usaha untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman nonmiliter. Kedua, fungsi sesuai tugas pokok dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

Saat ini pemerintah telah menyadari pentingnya modal dasar kestabilan kondisi keamanan sebagai penopang visi PMD, yaitu dengan mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.<sup>36</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa keamanan nasional, khususnya keamanan laut/maritim merupakan misi penting untuk dilaksanakan dalam rangka menjaga kedaulatan wilayah dan mengamankan sumber daya maritim. Oleh karena itu,

---

<sup>34</sup> Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2014), hlm. 49.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

<sup>36</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Rancangan Awal, RPJMN 2015-2019*, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Bab 6, (Jakarta: Bappenas, 2014), hlm. 3.

salah satu isu strategis yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan adalah penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan.<sup>37</sup>

Penekanan permasalahan penguatan keamanan maritim juga dilatarbelakangi oleh masih tingginya gangguan keamanan di laut yang disebabkan oleh masih kurangnya kehadiran dan kontrol aparat keamanan di laut. Oleh karena itu, dalam pembangunan lima tahun ke depan, Kabinet Kerja telah memprogramkan kegiatan unggulan berupa peningkatan pengawasan wilayah perairan Indonesia dan peningkatan sarana dan prasarana perbatasan.

Sebagai suatu negara dengan kekuatan ekonomi yang terus berkembang, kelanjutan kemajuan Indonesia akan makin bergantung pada perhubungan dan ketersediaan energi, serta pada sumber daya di laut dan di bawah laut. Dengan memperhatikan semua aspirasi tersebut di atas, maka kepentingan Indonesia di laut yang sangat utama adalah menjamin keamanan nasional dan integritas wilayah dan memberikan perlindungan terhadap gangguan dari luar, sehingga tugas penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan melaksanakan semua kegiatan pembangunan nasional dapat dilakukan dalam suasana yang aman dan damai.

### **Paradigma *World Class Navy* sebagai Strategi TNI AL untuk Mendukung Visi PMD**

Menurut Rosabet Moss Kanter, pengertian *world class* atau kelas dunia adalah standar tertinggi dalam aspek apapun agar dapat bersaing, dan melahirkan sebuah kelas sosial dengan kemampuan menguasai sumber daya, dan mengoperasikannya jauh melampaui perbatasan serta menyeberangi wilayah yang luas.<sup>38</sup> Sedangkan menurut *Merriam Webster Dictionary*, kelas dunia adalah kaliber atau tingkatan tertinggi di dunia. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan definisi dari TNI AL berkelas dunia adalah TNI AL yang mampu menghadirkan kekuatannya di berbagai penjuru dunia.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>38</sup> Rosabeth Moss Kanter, *World Class-Thriving Locally in the Global Economy*, (Pennsylvania, Philadelphia: Simon & Schuster, 2002), hlm. 22.

<sup>39</sup> Marsetio, *TNI AL Berkelas Dunia: Paradigma Baru*, (Jakarta: Markas Besar TNI AL, 2014), hlm. 4.

Untuk dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan Indonesia menjadi PMD, TNI AL harus memiliki kekuatan dan kemampuan yang sesuai dalam menjawab tantangan yang terjadi dalam lingkungan strategis yang ada. Oleh sebab itu, TNI AL perlu membangun kekuatan dan kemampuannya sejajar dengan angkatan laut negara maju lainnya. Peneliti sejarah angkatan laut, Anthony Bruce, Direktur Kebijakan pada Komite Penasehat Perdana Menteri Inggris dan William Cogar, guru besar sejarah angkatan laut di Akademi Angkatan Laut Amerika Serikat menyimpulkan, di negara manapun, angkatan laut selalu dituntut untuk mampu mendukung kepentingan nasional negaranya.<sup>40</sup> Dengan kondisi demikian, maka angkatan laut sejak pembentukannya dituntut harus memiliki kualitas sebagai angkatan laut kelas dunia. Hal ini juga relevan dengan teori peran tradisional angkatan laut secara universal yang dikemukakan Ken Booth, secara tradisional angkatan laut memiliki tiga peran, yaitu peran militer, diplomasi dan *constabulary*.<sup>41</sup>

Peran militer dibentuk karena karakter militansi sebagai angkatan bersenjata, peran diplomasi diadakan karena melaksanakan tujuan politik negara dan peran *constabulary* berkaitan dengan penegakan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi serta perlindungan terhadap kedaulatan wilayah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Penjelasan ini mempertegas pendapat bahwa pembentukan angkatan laut secara kualitatif harus mampu melaksanakan peran universal tersebut. Apabila angkatan laut telah mampu memenuhi tuntutan tugas sesuai peran universal dalam mengamankan kepentingan nasional di dalam maupun luar kawasan, maka secara kualitas dapat dikatakan angkatan laut tersebut telah berkelas dunia (*World Class Navy*).

Angkatan laut kelas dunia memiliki karakter unggul atau *excellent* dan karakter tersebut harus selalu ditunjukkan atau ditampilkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Karakter unggul tersebut antara lain:<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Anthony Bruce, William Cogar, *An Encyclopedia of Naval History*, (Chicago, USA: Fitzroy Dearborn Publisher, 1998).

<sup>41</sup> Ken Booth, *Navies and Foreign Policy*, (London: Croom Helm, 1977), hlm. 15-25.

<sup>42</sup> Marsetio, *op.cit.*, hlm. 7

- a. Sumber daya manusia yang unggul (*excellent human resources*). Personel atau sumber daya manusia adalah hal yang utama. Tanpa sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas, tidak mungkin organisasi dapat digerakkan secara maksimal. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi adalah personel yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tinggi untuk memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi organisasi.
- b. Unggul organisasi (*excellent organization*). Organisasi adalah dasar atau pondasi. Dari situlah angkatan laut dapat menjawab tantangan operasional mengamankan perairan Indonesia.
- c. Unggul kemampuan operasional (*excellent operational capability*). Operasi merupakan keluaran atau *output* kinerja angkatan laut yang dilaksanakan satuan-satuan operasi secara responsif, efektif dan multiguna. Angkatan laut berkelas dunia dalam menjalankan operasi selalu didukung kesiapan alutsista, intelijen yang akurat, logistik yang memadai, personel yang tangguh, serta kemampuan komando dan kendali yang handal dihadapkan pada luasnya spektrum operasi militer.
- d. Unggul teknologi (*excellent technology*). Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat pesat, termasuk di bidang militer dan keangkatanlautan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh terhadap doktrin, postur, strategi, operasional, maupun taktik penggunaan kekuatan TNI AL dalam menjalankan tugas, fungsi, perannya.

Kekuatan Angkatan Laut yang layak disebut Angkatan Laut kelas dunia seharusnya adalah Angkatan Laut yang memiliki kriteria kemampuan *Blue Water Navy* atau *Green Water Navy*, dan secara alamiah Angkatan Laut yang berkelas dunia selalu memainkan peran penting sebagai pemimpin di kawasan. *Blue Water Navy* adalah kekuatan maritim yang mampu beroperasi sampai dengan perairan dalam di laut terbuka.<sup>43</sup> Definisi lain dari *Blue Water Navy* adalah kekuatan maritim yang mampu beroperasi di perairan dalam di

---

<sup>43</sup> British Ministry of Defence, *British Maritim Doctrin*, BR 1806, Third edition, (London: The Stationery Office, 2004).

laut terbuka, mampu melaksanakan proyeksi kekuatan jauh dari pangkalan awal (*home base*).<sup>44</sup>

Untuk itu TNI AL secara berkesinambungan berupaya membangun kekuatan melalui validasi organisasi untuk meningkatkan kemampuan penggelaran unsur-unsur TNI AL, serta berupaya meningkatkan kualitas kekuatan TNI AL dengan program modernisasi alutsista. Kekuatan TNI AL diharapkan dapat selalu beradaptasi untuk merespons setiap ancaman dan tantangan di wilayah laut Indonesia, kawasan regional, dan bahkan kawasan global apabila dibutuhkan. Kemampuan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek operasional, namun juga berkaitan dengan kemampuan perencanaan, intelijen, dukungan logistik di berbagai pangkalan utama, pelatihan yang baik, kemampuan perawatan dan pemeliharaan alutsista, serta kemampuan riset dan pengembangan.

Pada akhirnya sasaran yang dituju melalui paradigma *world class navy* ini adalah kemampuan TNI Angkatan Laut sebagai Angkatan Laut kelas dunia yang terukur dalam empat keunggulan yang meliputi unggul di bidang sumber daya manusia, organisasi, operasi, dan teknologi sehingga mampu menyelenggarakan operasi dalam tiga jangkauan kawasan. Tiga jangkauan operasi yang dimaksud adalah kemampuan TNI Angkatan Laut melaksanakan operasi jarak pendek di wilayah laut Indonesia; operasi jarak menengah yang menjangkau kawasan regional dan operasi jarak jauh yang menjangkau kawasan global, sehingga TNI AL dapat diproyeksikan ke berbagai tempat untuk melindungi aset dan kepentingan Indonesia di berbagai kawasan dunia.<sup>45</sup>

Dengan paradigma angkatan laut berkelas dunia tersebut, TNI AL diharapkan mampu menuntaskan setiap tugas dan menjalankan peran serta fungsinya dalam mewujudkan tujuan nasional serta kewajiban internasional dalam mewujudkan ketertiban dunia. Berdasarkan pemahaman tentang konsep geopolitik dan geostrategi Indonesia, maka angkatan laut berkelas dunia bukanlah alat atau instrumen untuk menguasai secara fisik wilayah teritorial negara lain, akan tetapi merupakan wujud figur institusi yang mewakili karakter nasional termasuk kemampuan dalam mengeksploitasi kondisi

---

<sup>44</sup> Defense Security Service (United States Department of Defense), "Special Focus Area: Marine Sensors", *Targeting U.S. Technologies: A Trend Analysis of Reporting from Defense Industry*, 2010, dalam <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-043.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2015.

<sup>45</sup> Marsetio, *Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia, The Indonesian Navy's New Paradigm as a World Class Navy*, (Jakarta: Edisi Khusus Internal TNI AL, 2014), hlm. 30.



geografis dalam rangka membangun pengaruh dalam bentuk citra, kapabilitas dan kredibilitas.

### **Perencanaan Pembangunan Kekuatan TNI AL**

Implementasi tugas TNI AL harus dilaksanakan sejalan dengan undang-undang yang berlaku dan kebijakan politik negara. Perencanaan pembangunan kekuatan ini terbentuk melalui ekstraksi kebutuhan untuk menjalankan peran universal Angkatan Laut meliputi peran militer, diplomasi dan *constabulary*, yang diaplikasikan berdasarkan kepentingan penggunaan kekuatan agar dapat diproyeksikan di semua area yang menjadi kepentingan Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, maka TNI AL harus ditopang oleh kekuatan yang mampu menjawab segala tantangan seiring dengan dinamika lingkungan strategis. Kekuatan inilah yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi TNI AL, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga diperlukan perencanaan yang akurat untuk menghasilkan kekuatan ideal.

Di sisi lain, adanya faktor ketersediaan sumber daya, menyebabkan negara perlu menetapkan prioritas dalam kerangka pembangunan, sehingga pembangunan TNI AL yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam kerangka pembangunan nasional juga harus melakukan pemilihan prioritas tanpa mengabaikan asas pencapaian tujuan. Berdasarkan basis perencanaan *capability based planning*, TNI AL telah merencanakan kebutuhan ideal proyeksi kekuatan Angkatan Laut yang dibutuhkan untuk mencapai kemampuan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi di seluruh wilayah NKRI. Dari analisis tersebut, terbentuk kebutuhan postur yang harus direalisasikan pada tahun 2024, dengan perincian 274 KRI, 137 pesawat udara, dan 890 peralatan tempur marinir.<sup>46</sup>

Di sisi lain, anggaran pertahanan negara Indonesia masih belum mampu sepenuhnya mewujudkan kekuatan ini. Oleh karena itu, modifikasi perhitungan dan perencanaan pembangunan TNI AL saat ini dilaksanakan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kekuatan berdasarkan *capability based planning* serta

---

<sup>46</sup> Mabes TNI AL, 2015, Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/682/III/2015, Tanggal 9 Maret 2015 Tentang Kebijakan Perencanaan TNI AL Tahun 2016.

mempertimbangkan kemampuan anggaran. Pada akhirnya pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI AL dilaksanakan secara bertahap dan diarahkan pada sasaran yang mengacu prioritas dan kebutuhan yang mendesak. Ketidakmampuan anggaran dalam pemenuhan kekuatan ini dapat berakibat pada reduksi dari kebutuhan pembangunan kekuatan yang telah direncanakan berdasarkan *capability based planning* ideal sebelumnya. Postur akhir sementara yang disetujui oleh pemerintah dan telah direncanakan dalam program pembangunan *Minimum Essential Force* (MEF) komponen utama pertahanan hingga tahun 2024 untuk matra laut adalah 151 KRI, 54 pesawat udara, dan 333 peralatan tempur marinir.<sup>47</sup>

Proses realisasi pembangunan kekuatan yang telah direncanakan, akan dilaksanakan melalui program-program berupa akuisisi atau pengadaan baru, rematerialisasi atau pemeliharaan, revitalisasi atau peningkatan kemampuan dan relokasi atau alih fungsi. Adapun proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya dalam bentuk pengadaan alutsista dari dalam negeri, produksi bersama di dalam atau di luar negeri (*joint production*), *offset* (kandungan dalam negeri), maupun bentuk kompensasi *trade off* (imbal dagang), sedangkan sumber-sumber atau mekanisme pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Pinjaman Luar Negeri (PLN) atau Kredit Ekspor (KE) dan Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan (Bangtekindhan).

Prioritas dan fokus pengembangan postur TNI AL diarahkan pada perwujudan Kekuatan Pokok Minimum/MEF, namun dengan tetap mengacu pada konsep pengembangan Postur Ideal TNI AL yang telah direncanakan dalam jangka panjang. Standar Kekuatan Pokok Minimum ditentukan dengan mempertimbangkan secara holistik dan komprehensif ukuran minimum kekuatan satuan operasional untuk menangani ancaman aktual dalam jangka pendek maupun ancaman potensial dalam jangka panjang. Prioritas pertama perwujudan Kekuatan Pokok Minimum adalah peningkatan kemampuan mobilitas TNI AL untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok TNI AL di seluruh wilayah nasional. Prioritas Kekuatan Pokok Minimum selanjutnya adalah pada peningkatan kemampuan satuan tempur khususnya pasukan pemukul

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

(*striking force*) baik satuan di tingkat pusat maupun satuan di wilayah, serta penyiapan pasukan siaga (*standby force*) terutama untuk penanganan bencana alam serta tugas-tugas misi perdamaian dunia dan keadaan darurat lainnya.

Perwujudan Kekuatan Pokok Minimum akan dipenuhi secara bertahap sehingga diharapkan Kekuatan Pokok Minimum dapat dijadikan sebagai pijakan dasar menuju postur TNI AL yang ideal. Pembangunan TNI AL dalam mendukung visi PMD diarahkan untuk mencapai dua tujuan yaitu untuk melindungi kedaulatan wilayah dan sumberdaya nasional, serta menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Pembangunan kekuatan TNI AL dilaksanakan melalui proses perencanaan strategis dimanifestasikan ke dalam empat program kegiatan, yakni:

a. Program Dukungan Kesiapan Matra Laut;

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan (*readiness*) gelar seluruh unsur TNI AL agar selalu siap dikerahkan untuk menjalankan tugas dengan jalan meningkatkan anggaran operasional serta anggaran untuk perawatan dan perbaikan Alutsista dan berbagai peralatan TNI AL yang dibutuhkan untuk melaksanakan operasi.

b. Program Modernisasi Alutsista dan Non-Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Pertahanan Negara Matra Laut;

Program modernisasi ini diarahkan untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional TNI AL. Untuk mencapai tujuan dalam menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia, kekuatan TNI AL akan dikembangkan dengan penambahan kapal patrolilepas pantai (*Offshore Patrol Vessel/OPV*), kapal patroli (*Patrol Craft*) ukuran 40 dan 60 meter, serta kapal patroli kecil berukuran 28 meter. Kapal-kapal tersebut akan digelar di pangkalan-pangkalan TNI AL yang berada di seluruh wilayah Indonesia, untuk meningkatkan cakupan wilayah operasi dan menimbulkan dampak penangkalan terhadap pelaku potensial kegiatan ilegal di perairan Indonesia, serta untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan dan siklus operasi kapal-kapal yang melaksanakan patroli.

Dalam meningkatkan kemampuan untuk melindungi kedaulatan wilayah dan sumberdaya nasional, TNI AL juga melaksanakan modernisasi kekuatan

pemukul dengan menambah jumlah dan kualitas unsur-unsur kapal pemukul berukuran besar seperti *frigate* dan *destroyer* dan kapal selam serta kapal-kapal pendukung logistik. Selain itu, kemampuan pengamatan laut akan ditingkatkan dengan penambahan unsur patroli udara. Kebutuhan kapal bertonase besar tersebut untuk menjamin kemampuan TNI AL dapat dikerahkan beroperasi di perairan terbuka seperti Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam waktu yang lama, sehingga dapat mempertahankan kehadiran di perairan yang menjadi perhatian dan kepentingan Indonesia.

Pembangunan kekuatan TNI AL tidak hanya diimplementasikan dengan pembangunan Alutsista seperti kapal dan pesawat udara, tetapi juga pembangunan pangkalan-pangkalan di posisi yang strategis. Pangkalan TNI Angkatan Laut memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pembekalan, perbaikan, dan perawatan personel Alutsista TNI AL. Untuk mendukung efektivitas operasi, pangkalan-pangkalan TNI Angkatan Laut akan terus dikembangkan sehingga memiliki fasilitas dan kemampuan yang memadai, terutama berupa dermaga dengan ukuran minimal 150 meter, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal, rumah sakit, perumahan, serta kemampuan dukungan logistik.

Disamping itu, keberadaan pangkalan tersebut juga digunakan untuk fungsi pemberdayaan wilayah pertahanan laut, sebagai aplikasi dari konsep pertahanan semesta yang menggunakan seluruh sumber daya dan sarana-prasarana nasional untuk kepentingan pertahanan. Dalam masa damai, sumber daya nasional dibina dan disiapkan untuk digunakan sebagai komponen cadangan dan pendukung untuk meningkatkan kapasitas pertahanan negara. Dalam aplikasi praktisnya, pemberdayaan wilayah pertahanan laut dilaksanakan melalui penyiapan berbagai komponen kekuatan maritim nasional, seperti masyarakat maritim, industri dan jasa maritim, serta sarana dan prasarana nasional untuk digunakan bagi kepentingan pertahanan.

Dalam program modernisasi tersebut, TNI AL selalu berupaya memberdayakan industri strategis nasional, industri pertahanan nasional, lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan, serta peran akademisi melalui

kerja sama yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara.

c. Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut;

TNI AL menyadari bahwa kekuatan utama dari semua program pembangunan kekuatan terletak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh TNI AL. Untuk itu TNI AL berupaya meningkatkan pendidikan dan latihan profesi keangkatan lautan dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat lanjut yang selaras dengan teknologi Alutsista, perkembangan Iptek dan kebutuhan organisasi. Selain itu, TNI AL juga mendorong peningkatan ilmu pengetahuan dan ketrampilan SDM TNI AL dengan mengirim personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan di universitas baik di dalam negeri maupun luar negeri secara berkala dan berkelanjutan.

d. Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasi Matra Laut.

Untuk meningkatkan kemampuan dalam melindungi kedaulatan wilayah dan sumberdaya nasional, serta menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran di wilayah Indonesia, TNI AL berupaya meningkatkan *interoperability* diantara kekuatan TNI, serta penguatan dan pengefektifan pertukaran informasi dengan instansi kemaritiman nasional. TNI AL mendorong terciptanya organisasi yang mengelola sistem pengawasan lingkungan maritim dan pertukaran informasi serta koordinasi kelembagaan secara terpadu. TNI AL juga mendorong terbentuknya pola operasi terpadu diantara aparat kewanatan laut sehingga lebih efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan tersebut, TNI AL saat ini melakukan sinergi dengan berbagai instansi penegak hukum di laut dengan melaksanakan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk menciptakan ketertiban hukum dan keteraturan di laut (*law and order at the sea*), seperti Polisi Perairan dan Udara, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Upaya TNI AL tersebut sejalan dengan langkah pemerintah yang pada saat ini telah membentuk dan menguatkan Badan Keamanan Laut (Bakamla), yang merupakan mitra TNI AL dalam menjamin keamanan dan keselamatan di wilayah laut Indonesia. Kerja sama antar instansi pemangku kepentingan (*stake holder*) di laut diharapkan akan

semakin meningkat melalui koordinasi antar Kementerian dan Lembaga, integrasi sistem informasi dan pengawasan maritim, manajemen operasi terpadu, dan penataan berbagai regulasi untuk meningkatkan efektivitas dan menghilangkan tumpang-tindih kegiatan atau kewenangan.

## **Kesimpulan**

Permasalahan, tantangan dan tugas TNI AL ke depan berkaitan erat dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan sulit diprediksi baik global, regional maupun nasional. Keberlangsungan pembangunan maritim dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai PMD sangat tergantung dari stabilitas keamanan di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia dan di kawasan. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut telah berupaya maksimal meningkatkan kekuatan dan kemampuannya agar dapat melaksanakan tugas dan perannya dalam bidang pertahanan negara di laut serta mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam membangun sektor kemaritiman. Sebagai negara kepulauan dengan posisi yang strategis dan dihadapkan dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, maka suatu keharusan bagi kita untuk memiliki Angkatan Laut yang kuat dan modern agar mampu menghadapi setiap ancaman bangsa ke depan yang akan semakin besar, kompleks, dinamis dan multi dimensi.

Dalam mewujudkan visi PMD ini dibutuhkan peran dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pertahanan negara yang tangguh dengan mempertimbangkan geopolitik dan geoekonomi negara yang berwawasan kemaritiman, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan pembangunan pertahanan negara yang berwawasan maritim. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan strategi untuk pembangunan pertahanan maritim negara yang mengkolaborasikan semua potensi kemampuan pertahanan negara. Dalam rangka mewujudkan rencana strategi tersebut dibutuhkan adanya konsistensi pembangunan pertahanan maritim dengan suatu perencanaan yang terintegrasi, terpadu, terorganisasi dan berkesinambungan antar matra TNI, kementerian, maupun dengan lembaga pemerintahan lainnya, serta tetap berpegang pada prinsip-prinsip transparan dan akuntabel melalui pemberdayaan seluruh potensi yang ada secara sinergis dan optimal.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Bruce, Anthony, & William Cogar. 1998. *An Encyclopedia of Naval History*. Chicago, USA: Fitzroy Dearborn Publisher.
- Booth, Ken. 1977. *Navies and Foreign Policy*. London: Croom Helm.
- British Ministry of Defence. 2004. *British Maritime Doctrine*, BR 1806. Third edition. London: The Stationery Office.
- Cipto, Bambang. 2007. *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Diana, Ariesta. 2015. "Bangkitkan Industri Maritim dengan Tol Laut", dalam Indroyono Soesilo. 2015. *Iptek Pertahanan Penopang Indonesia PMD*. Bogor: Sains Press.
- Kanter, Rosabeth Moss. 2002. *World Class-Thriving Locally in the Global Economy*. Pennsylvania, Philadelphia: Simon & Schuster.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2014. *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2014. *Rancangan Awal, RPJMN 2015-2019*, Buku II Agenda Pembangunan Bidang, Bab 6. Jakarta: Bappenas.
- Mahan, Alfred Thayer. 1890. *The Influence of Sea Power Upon History: 1660-1783*, (US: Little, Brown and Co.
- Marsetio. 2014. *TNI AL Berkelas Dunia: Paradigma Baru*. Jakarta: Markas Besar TNI AL.
- , 2014. *Paradigma Baru TNI AL Kelas Dunia, The Indonesian Navy's New Paradigm as a World Class Navy*. Jakarta: Edisi Khusus Internal TNI AL.
- Till, Geoffrey. 2009. *Seapower, A Guide for the Twenty-First Century*, Second Edition. London: Frank Cass Publishers.

### Jurnal

- Annawitt, Philipp. 2010. "Global Security and Regional Responses: Conflict Management in a Fractured World". *Geneva Papers*.
- Hansen, Stig Jarle. 2012. "Debunking The Piracy Myth: How Illegal Fishing Really Interacts with Piracy In East Africa". *The Rusi Jurnal*.

### Website

- Dahuri, Rochmin, "Indonesia Raksasa Maritim: Masih Tertidur Lelap", dalam <http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8386/Indonesia.Raksasa.Maritim:.Masih.Tertidur.Lelap>, 3 Juni 2014, diunduh pada 25 Juni 2015.
- Defense Security Service (United States Department of Defense), "Special Focus Area: Marine Sensors, Targeting U.S. Technologies: A Trend Analysis of Reporting from Defense Industry, 2010", dalam <http://nsarchive.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB424/docs/Cyber-043.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2015.
- Emmers, Ralf, "The US Rebalancing Strategy: Impact on the South China Sea", National Security College, Australian National University, dalam <http://nsc.anu.edu.au/documents/occasional-5-brief-8.pdf>, diunduh pada 27 Juni 2015.

Easton, Ian, "China's Military Strategy In The Asia-Pacific: Implications For Regional Stability", *Project 2049 Institute*, 2013, dalam [http://www.project2049.net/documents/China\\_Military\\_Strategy\\_Easton.pdf](http://www.project2049.net/documents/China_Military_Strategy_Easton.pdf), diunduh pada 26 Juni 2015.

"Isu Keamanan Maritim Regional", *Tabloid Diplomasi*, Edisi 4 Tahun I, September 2010, dalam <http://www.tabloiddiplomasi.org/pdf/2010/Suplemen%20September%202010.pdf>, diunduh pada 25 Juni 2015.

Jane's Defence Weekly Online, "China Commissions First Aircraft Carrier", dalam <http://www.janes-defence-weekly.com>, 25 September 2012, diunduh pada 27 Juni 2015.

Jane's Defence Weekly Online, "Chinese Frigates Locked Onto Japanese JMSDF ship, Helicopter in Disputed Waters", dalam <http://www.janes-defence-weekly.com>, 6 February 2013, diunduh pada 27 Juni 2015.

Kemensesneg RI, *Visi, Misi dan Strategi*, dalam <http://www.indonesia.go.id/in/sekilas/indonesia/visi-misi-dan-strategi>, diunduh pada 25 Juni 2015.

"PMD dan Peran Indonesia di Internasional", *Jurnal Maritim*, dalam <http://jurnalmaritim.com/2014/12/poros-maritim-dunia-dan-peran-indonesia-di-internasional>, 26 Desember 2014, diunduh pada 19 Mei 2015.

Strategi Maritim Amerika Serikat, "A Cooperative Strategy for 21<sup>st</sup> Century Seapower", 2015, dalam <http://www.navy.mil/local/maritime/150227-CS21R-Final.pdf>, diunduh pada 25 Juni 2015.

Shondakh, Bernard Kent, "Mantan Kasal: Kurang Paham Konsep Poros Maritim Pemerintah", *Jurnal Maritim*, dalam <http://jurnalmaritim.com/2015/03/mantan-kasal-kurang-paham-konsep-poros-maritim-pemerintah/>, 20 Maret 2015, diunduh pada 16 Mei 2015.

<http://www.apec.org>, diunduh pada 26 Juni 2015.

<http://www.asean-cn.org/default.aspx>, diunduh pada 26 Juni 2015.

<http://www.mofa.go.jp/policy/economy/fta/indonesia.html>, diunduh pada 26 Juni 2015.

<http://www.asean.org/communities/asean-economic-community>, diunduh pada 26 Juni 2015.

## Lain-lain

Akimoto, Kazumine. 2001. "The Current State of Maritime Security-Structural Weaknesses and Threats in the Sea Lanes". Makalah yang dipaparkan dalam acara *Maritime Security in Southeast Asia and Southwest Asia*, Tokyo.

Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 (UNCLOS 1982), Pasal 46.

Makalah Kepala Staf TNI AL: Langkah-Langkah Strategis TNI AL Dalam Mendukung PMD. 2015.

Mabes TNI AL. 2015. Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Kep/682/III/2015, Tanggal 9 Maret 2015 Tentang Kebijakan Perencanaan TNI AL Tahun 2016.

Salinan naskah terjemahan pidato Presiden Republik Indonesia pada *9th East Asia Summit*, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.